



PERAN SOSIOLOGI MILITER DALAM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

The Role Of Military Sociology In State Defense And Security

Kol. H. Yusuf

UNINUS Indonesia

Email: dryusuf337@gmail.com

Abstract

Yusuf, the role of military sociology in the defense and security of the state. This study is the result of discussion of the role of military sociology in Indonesia on the defense and security of the region, resulting in the following: (1) At the beginning of the revolution, the Government of Indonesia did not form an official army. Elements of forming BKR, TKR, TRI to TNI were built with three main elements each having different backgrounds ie former members of KNIL, former members of PETA, and the army of the people. Elements that later became the forerunner to the establishment of the TNI (Indonesian National Army) which later developed into the Army, Navy, and Air Force. The TNI is headed by a TNI Commander, while each force has a Chief of Staff of the Armed Forces. (2) The role of military sociology in the defense and security of the state can not be kept away from the basic role of the TNI itself. According to the TNI Law Article 7 paragraph (1), the main task of the Indonesian National Army is to uphold the sovereignty of the state, to maintain the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution, and to protect the whole nation and the whole of Indonesia from the threat and disturbance to the nation and country. (3) One form of military sociology is the kowil (Regional Command), the existence of Koramil and Babinsa in the community, can close and prevent the existence of opportunities for the development of organizations that become a latent danger for the state of Indonesia. The monitoring of loose territory due to Kowil personnel limitation, will give the communists the opportunity to grow rapidly, as indications of emergence of hazards that threaten the defense and security of the country are visible.

Keywords: *Sociology, Military, Defense, Security, Territory*

Abstrak

Yusuf, peran sosiologi militer dalam pertahanan dan keamanan negara. Penelitian ini merupakan hasil pembahasan peran sosiologi militer di Indonesia terhadap pertahanan dan keamanan wilayah, yang menghasilkan sebagai berikut: (1) Pada awal revolusi, Pemerintah Indonesia tidak membentuk tentara resmi. Elemen pembentukan BKR, TKR, TRI hingga TNI dibangun dengan tiga unsur utama yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda yakni mantan anggota KNIL, mantan anggota PETA, dan laskar rakyat. Elemen tersebutlah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya TNI (tentara Nasional Indonesia) yang kemudian berkembang menjadi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan. (2) Peran sosiologi militer dalam pertahanan dan keamanan negara tidak bisa dijauhkan dari peran tugas pokok TNI itu sendiri. Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (3) Salah satu bentuk peranan sosiologi militer adalah kowil

(Komando Kewilayahan), Keberadaan Koramil dan Babinsa di lingkungan masyarakat, dapat menutup dan mencegah adanya peluang berkembangnya organisasi yang menjadi bahaya laten bagi negara Indonesia. Pemantauan wilayah yang longgar karena keterbatasan personel Kowil, akan memberi peluang bagi komunis untuk berkembang pesat, karena indikasi kemunculan bahaya yang mengancam pertahanan dan keamanan negara sudah terlihat.

Kata Kunci: Sosiologi, Militer, Pertahanan, Keamanan, Wilayah

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". UUD 1945 menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".¹ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa wilayah NKRI yang sangat luas, dalam hal ini tidak hanya pada letak geografisnya, namun juga demografinya, dimana NKRI terdiri dari berbagai suku bangsa.

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sebagaimana termaktub dalam Tap MPR No. VII/2000 tentang Peran TNI dan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan negara dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sejarah militer memiliki usia yang sangat panjang. Salah satu teks sejarah lama *Histoire de la guerre du Peloponneso*. (Sejarah Perang Peloponnesos) yang ditulis Thucydide abad ke-5 merupakan sejarah militer. Setelah tahun 1870 meningkatnya minat Perancis terhadap sejarah militer, dengan alasan sebagai berikut. Pertama, dalam rangka mengenang kemenangan tentara terhadap musuh. Kedua, pentingnya pengkajian strategi militer. Yayasan La Sabretache yang didirikan untuk mengumpulkan benda-benda yang berhubungan dengan kemiliteran menjadi cikal bakal Museum Tentara di Perancis tahun 1896.

Sejak awal, kemerdekaan Indonesia telah menghadapi berbagai ujian, mulai dari peristiwa berdarah merebut senjata tentara Jepang, masuknya NICA, pemberontakan PKI Madiun 1948, pemberontakan daerah, pengepungan istana presiden hingga gagalnya parlemen hasil pemilu 1955 menetapkan konstitusi nasional.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, adalah sumber dari seluruh tatanan dan kehidupan politik bagi Indonesia sebagai negara yang baru. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang diraih tanpa perjuangan. Perjuangan yang panjang dan penuh dengan lika-liku pada akhirnya menghasilkan proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Ir.

¹ Pasal 33 ayat (3)

Sukarno dan Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik awal dimulainya kehidupan baru bagi bangsa ini.²

Presiden Soekarno tidak membentuk tentara bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan RI, mengangkat Supriyadi sebagai menteri Keamanan dan Hankam secara absteinsi. Ketidakpastian negara meletakkan dasar tentara dan pertahanan nasional pada awal kemerdekaan menyebabkan kelahiran tentara Indonesia berbeda dengan negara lain. Tentara Indonesia dibangun atas desakan tentara KNIL dan PETA karena kepentingan revolusi kemerdekaan.

Nugroho Notosusanto³ menyebutkan militer Indonesia sebagai tentara patriot revolusioner. Tentara lahir karena revolusi kemerdekaan yang berintikan tentara peninggalan penjajah (PETA dan KNIL) dan milisi rakyat yang terbentuk secara tidak sengaja karena patriotisme membela negara. Sehari sesudah pernyataan kemerdekaan itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mulai mengadakan siding sebanyak tiga kali, untuk membicarakan hal-hal yang sehubungan dengan telah berdirinya Republik Indonesia.⁴

Salah satu organ yang perlu dimiliki oleh pemerintah suatu negara ialah militer, yang merupakan satu kelompok orang-orang yang di organisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuran, yang dibedakan dari orang-orang sipil.⁵ Militer pada masa awal kemerdekaan belum jelas statusnya, masih diambang awan. Pada masa pemerintahan kolonial, Indonesia tidak mempunyai militer.

Pada masa pemerintahan kolonial militer hanya dimiliki oleh pemerintah dan orang-orangnya hanya berasal dari orang Eropa atau Belanda dan sedikit sekali dari orang pribumi. Pembentukan militer pada masa kolonial pada tanggal 4 Desember 1830 oleh Van den Bosh, untuk meredem konflik atau serangan dari tentara kerajaan ditanah Jawa. Nama pasukan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda adalah Oost Indische Leger (Tentara Hindia Timur). Tahun 1836 Raja Willem I menghendaki pemberian status sebagai Koninklijk Leger (Tentara Kerajaan), sehingga nama lengkapnya adalah Koninklijk Nederlandche Oos Indische Leger (KNIL).⁶

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945 sifat pergerakan berubah menjadi sangat militan, dengan berbagai doktrin yang diberikan pasukan Jepang kepada rakyat Indonesia terutama para pemuda. Mobilitas penduduk

² Peristiwa instabilitas nasional pada awal kemerdekaan dapat dibaca diantaranya dalam Nugroho Noto Susanto, (PJ), 1985. *Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka*, (Ed Lux). Jakarta: Citra Lamtorogung Persada. hlm. 71. Cet ke-5

³ Nugroho Notosusanto, 1985. *Prajurit dan Pejuang, Persepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: Sinar Harapan, Cet II, hlm 17. Pendapat ini tidak disepakati Burhan Magenda yang menyebutkan tentara Indonesia sebagai Tentara Revolusioner, lahir karena revolusi kemerdekaan, lihat Amos Permitter, 1984, *The Military and Politic In Modern times on Profesional, Prerian ang Revolusioner*, (terjm) Sahat Simamora. Jakarta: Rajawali. hlm. 42

⁴ Harun Al Rasyid. (1968). *Sekitar Proklamasi, Konstitusi, dan Dekrit Presiden*. Djakarta: Pelita Ilmu. hlm. 11-13.

⁵ Yahya A. Muhaimin, 2005. *Perkembangan militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 1

⁶ Petrik Matanasi, 2007. *KNIL Bom Waktu Tinggalan Belanda*. Yogyakarta: Medpress. hlm. 17

Indonesia oleh pemerintah Jepang mempercepat proses penyerapan dan pengetahuan tentang kemiliteran yang dimiliki Jepang.⁷

Pada masa itu, Jepang sedang menjalankan pertempuran menghadapi pasukan sekutu atau dikenal dengan Perang Dunia II dan Perang Pasifik. Jepang membutuhkan pasukan untuk membantu tentara Jepang dalam perang tersebut. Karena Jepang terus menghadapi kekalahan maka pemerintahan Jepang di Indonesia mengambil keputusan untuk melatih rakyat tentang militer untuk membantu tentara Jepang melawan Sekutu.

Para pemuda dilatih kemiliteran dalam PETA (Pembela Tanah Air), Haiho⁸ dan Gyugun⁹. Pasukan Jepang juga melatih kemiliteran kepada seluruh masyarakat dengan membentuk organisasi semi-militer seperti Keibondan dan Seinendan.¹⁰ Militer ini dibentuk oleh Jepang agar Indonesia tidak lepas, maka Jepang membentuknya dengan alasan untuk mempertahankan Indonesia terhadap serangan Sekutu.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Luasnya wilayah NKRI mengidentifikasikan luasnya konflik atau peristiwa yang mengancam keutuhan NKRI itu sendiri
2. NKRI membutuhkan tentara, dalam hal ini TNI dalam mempertahankan dan menjaga pertahanan dan keamanan negara
3. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Perlunya pengetahuan dan wawasan tentang sosiologi militer dalam pertahanan dan keamanan negara

Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dalam sosiologi militer di Indonesia?
2. Bagaimana peran sosiologi militer dalam pertahanan dan keamanan negara?

⁷ Suyatno Kartodirdjo, 1997. *Kepemimpinan ABRI dalam Perspektif sejarah.*” dalam Djoko Subroto, *Visi ABRI Menatap Masa Depan.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres. hlm. 12

⁸ Heiho adalah pembantu prajurit Jepang baik digaris depan pertempuran maupun digaris belakang. Heiho dibentuk atas kehendak kementerian angkatan darat. Anggota Heiho mendapatkan pendidikan militer selama 2bulan kemudian disebarakan dalam satuan-satuan yang diperbantukan kepada angkatan perang Jepang. Atim Supomo, dkk. 1996. *Brimob Polri Jateng dan DIY dalam Lintasan Sejarah.* Semarang: Brigade Mobile Polri Polda Jateng. hlm. 19

⁹ Gyugun adalah angkatan bersenjata yang dibentuk di Sumatra yang hampir sama kedudukannya dengan PETA di Jawa. Latihan militer diselenggarakan oleh Sumatra Gunseibu di Bukittinggi selama 6 bulan. Latihan militer dimulai pada bulan November 1943. Harsja W. Bachtiar, 1988, *Siapa Dia? Perwira Tinggi Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI-AD).* Jakarta: Djambatan. hlm. 41

¹⁰ Pembentukan Keibondan (Barisan Pembantu Polisi) dan Seinendan (Barisan Pemuda) diumumkan pada tanggal 29 April 1943 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang. Kedua organisasi ini bertugas untuk mempersiapkan para pemuda baik mental maupun teknis untuk memberikan sumbangan kepada usaha pertahanan Jepang garis belakang, terutama didaerah propinsi, desa, pabrikpabrik dan perkebunan. Keibondan adalah barisan pemuda sebagai pembantu polisi Jepang

Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penulisan berikut:

1. Mendeskripsikan sejarah dalam sosiologi militer di Indonesia
2. Menganalisa dan memaparkan peran sosiologi militer dalam pertahanan dan keamanan negara.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi pustaka.

PEMBAHASAN

Sejarah Sosiologi Militer Indonesia

Pada awal revolusi, Pemerintah Indonesia tidak membentuk tentara resmi. Elemen pembentukan BKR, TKR, TRI hingga TNI dibangun dengan tiga unsur utama yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda yakni mantan anggota KNIL, mantan anggota PETA, dan laskar rakyat.¹¹

Sebelum Kemerdekaan

1. *Koninklijk Nederlandsche Indische Leger (KNIL)*

Peranan kaum pribumi dalam dinas militer tidaklah terlalu menonjol, orang-orang Indonesia masuk kedalam dinas ketentaraan kolonial tidak lebih sebagai prajurit atau perwira rendahan, ini dimungkinkan khususnya setelah Berakhirnya perang Jawa, dimana dengan cara licik perlawanan Pangeran Diponegoro diakhiri. Perang yang berlangsung dari 1825-1830 tersebut telah membuat Belanda menerima pelajaran penting, Hindia Belanda harus memiliki pasukan yang menjaga keamanan dan ketertiban Hindia Belanda. Gubernur Jenderal saat itu, Van Den Bosch segera membentuk pasukan bernama Oost Indische Leger (Tentara Hindia Timur), Belanda mengontrak orang-orang mantan serdadu disersi dari Eropa seperti Jerman, Belgia, Swiss, Perancis serta orang-orang Afrika barat (Ghana) untuk dijadikan serdadu yang handal di wilayah jajahan Hindia Timur.¹²

Pada tahun 1836, raja Willem I memberikan predikat koninklijk untuk kesatuan tentara Hindia Timur ini, namun predikat tersebut tidak pernah digunakan selama satu abad. Kemudian pada tahun 1933 barulah nama pasukan tersebut diubah menjadi *Koninklijk Nederlandsche Indische Leger (KNIL)* yang beranggotakan serdadu Belanda, tentara bayaran dan sewaan dari negara lain serta warga pribumi (Indonesia) yang ditugaskan di wilayah Hindia Timur (Indonesia) pada zaman VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*)¹³. Orang Indonesia menyebutnya tentara kompeni atau kumpeni. Agar pribumi tidak memiliki persatuan, maka Belanda membagi KNIL pribumi berdasarkan suku; Suku Jawa, Sunda, Ambon dan Manado. Selain itu bangsa pribumi juga tidak pernah menempati pangkat tertinggi, mereka selalu ditempatkan dalam pangkat terendah.

¹¹ Budi Susanto, SJ. ABRI, Siasat Kebudayaan 1945-1995, Yogyakarta, Kanisius, 1995, hlm.15

¹² *Ibid.*

¹³ Paul Van't Veer, Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje, Jakarta: Grafiti Pers, 1985, hlm 3

Kehidupan sosial tentara pribumi lebih mirip sebagai orang belanda ketimbang bangsa pribumi, mereka juga tidak bisa menyamai status golongan priyayi karena tidak memiliki status askriptif sebagai priyayi. Persentuhan dengan masyarakat pribumi hampir tidak pernah terjadi karena kehidupan sosial sehari-harinya hanya berkisar diseputar barak. Dan dalam dinas ketentaraan, pergaulan antara tentara eropa dan pribumi juga dipisahkan

2. PETA

Ketika Jepang mulai menduduki wilayah nusantara pada tahun 1942. Jepang mendirikan Pembela Tanah Air (PETA) Untuk mempertahankan tanah jajahannya. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia dalam masa pendudukan Jepang. Tentara Pembela Tanah Air dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei No 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara Ke-16.

Osamu Seirei No 44, 3 Oktober 1943 berisikan mengenai Pembentukan Pasukan Sukarela untuk membela Pulau Jawa dengan status:¹⁴ Kesatu, Tentara Pembela Tanah Air (PETA), terdiri dari warga negara yang asli, Kedua, Tentara Pembela Tanah Air (PETA), dilatih oleh tentara Jepang; Ketiga, Tentara Pembela Tanah Air (PETA), bukan milik organisasi manapun, langsung dibawah Panglima Tentara Jepang; Keempat, Tentara Pembela Tanah Air (PETA), sebagai tentara teritorial yang berkewajiban mempertahankan wilayahnya (syuu); Kelima, Tentara Pembela Tanah Air (PETA), siap melawan sekutu.

Pembentukan PETA berawal dari surat Raden Gatot Mangkupraja kepada Gunseikan (kepala pemerintahan militer Jepang) pada bulan September 1943 yang antara lain berisi permohonan agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintahan Jepang di medan perang. Pada pembentukannya, banyak anggota Seinen Dojo (Barisan Pemuda) yang kemudian menjadi anggota senior dalam barisan PETA. hal ini merupakan strategi Jepang untuk membangkitkan semangat patriotisme dengan memberi kesan bahwa usul pembentukan PETA berasal dari kalangan pemimpin Indonesia sendiri. sebagaimana berita yang dimuat pada koran "Asia Raya" pada tanggal 13 September 1943, yakni adanya usulan sepuluh ulama: K.H. Mas Mansyur, KH. Adnan, Dr. Abdul Karim Amrullah (HAMKA), Guru H. Mansur, Guru H. Cholid. K.H. Abdul Madjid, Guru H. Jacob, K.H. Djunaedi, U. Mochtar dan H. Mohammad Sadri, yang menuntut agar segera dibentuk tentara sukarela bukan wajib militer yang akan mempertahankan Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan adanya peran golongan agama dalam pembentukan ini.

Pemuda-pemuda itu tidak hanya mendapat latihan militer, tetapi pada diri mereka juga ditanamkan perasaan yang sangat anti sekutu yang dengan cepat berkembang menjadi suatu nasionalisme.

PETA memperoleh pendidikan dasar infanteri dan indoktrinasi ala samurai, orang-orang Indonesia diangkat menjadi komandan pleton dan kompi, bahkan jabatan komandan batalyonpun diisi oleh orang-orang Indonesia dari golongan elit, komandan batalyon diangkat oleh pertama-tama tidak karena

¹⁴ Ahmad Mansyur Suryanegara, PETA; Pemberontakan Di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan, Jakarta, Yayasan Wira Patria Mandiri, 1996, hal 21

kualitas potensial mereka sebagai pemimpin militer melainkan berdasarkan pertimbangan politik.¹⁵

3. Laskar Rakyat

a. Hizbullah Sabilillah

Hizbullah dan Sabilillah adalah laskar rakyat paling kuat yang pernah hidup di bumi Indonesia. Meskipun dalam sejarah, keberadaan laskar tersebut disisihkan. Buktinya, perjuangan mereka tidak ditemukan dalam museum-museum. Dikarenakan para laskar ini seringkali berselisih paham dengan pemerintah Soekarno yang tidak bersikap tegas dalam menentang pendaratan pasukan Sekutu dan Belanda ketika itu.

Laskar Hizbullah sendiri dibentuk atas anjuran Masjoemi pada 21 Juli 1945. Selain untuk dipertahanan Pulau Jawa, organisasi ini juga ditujukan untuk membela dan menyebarkan Islam. Pedoman Ilmu yang ditentukan oleh Masjoemi, sedang pimpinannya dipegang oleh ulama dan kiai. Sebagian besar anggotanya berasal dari pesantren dan madrasah. Dalam kongres Masjoemi. pada 7 dan 8 November 1945, diputuskan untuk membentuk suatu badan perjuangan lain, Sabilillah. Pimpinannya terdiri dari K.H Masjoer, Wondoamiseno, H. Hasjim dan Soelio Adikoesoemo. Pria di bawah usia 35 tahun menjadi anggota Hizbullah, sedang yang berumur di atasnya masuk Sabilillah. Organisasi untuk pemuda adalah GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia).

b. GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia)

GPII menempatkan diri sebagai organisasi yang bisa menerima pemuda dari semua kalangan Islam. Bahkan dalam perkembangannya karena sebelum ada GPII sudah ada organisasi pemuda Islam yang mengkhususkan diri dalam perjuangan kelasykaran, yaitu Hizbullah. maka pada tanggal 5 Oktober 1945 diadakan kesepakatan untuk menggandengkan penyebutan GPII dengan Hizbullah. GPII garis miring atau dalam kurung Hizbullah.

Dari saat berdirinya sampai dipaksa membubarkan diri oleh pemerintah yaitu pada tanggal 10 Juni 1963 Presiden Soekarno membubarkan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dengan KEPPRES RI NO. 139/1963 yang menyatakan organisasi GPII termasuk bagian-bagiannya/cabang-cabang/ranting-rantingnya diseluruh wilayah Indonesia sebagai organisasi terlarang dan diperintahkan untuk menyatakan pembubaran organisasi GPII dalam waktu 30 hari sejak tanggal tersebut. Sampai sekarang ini keppres tersebut belum pernah dicabut dan beberapa tokohnya ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim orde lama tanpa ada proses pengadilan

c. BPRI (Barisan Pemberontak Republik Indonesia)

BPRI berpusat di Surabaya sedang kegiatannya terutama bertumpu pada pemimpinnya, Bung Tomo. yang sangat populer berkat pidato-pidato radionya yang bersemangat dan membakar. Ideologi mereka yang ekstrim-revolusioner diterima oleh masyarakat luas termasuk pengikut Masjoemi. Pada kenyataannya, berkat agitasi massanya yang terus menerus, BPRI berhasil memainkan peranan sebagai pemersatu. Kekacauan organisasi ini disebabkan kecondongan anarki mereka.

¹⁵ Hendri F. Isnaeni, *Kontroversi Sang Kolaborator*, Ombak, Jakarta, 2008, hal 1

Setelah Kemerdekaan

1. BKR

Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengumumkan terbentuknya sebuah “Badan Penolong Keluarga Korban Perang” yang secara keorganisasian mencakup sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR). Di dalam undang-undang pembentukannya, fungsi BKR secara samar-samar disebutkan sebagai “memelihara keamanan bersama-sama dengan rakyat dan badan-badan negara yang bersangkutan”¹⁶

Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda mantan PETA, Heiho, dan pemuda lainnya untuk sementara waktu bergabung dan bekerja di dalam BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit tentara kebangsaan jika telah datang waktunya.¹⁷

Walaupun secara resmi BKR adalah aparat untuk menjaga keamanan setempat, namun karena desakan situasi pada waktu itu, maka BKR memelopori usaha perebutan-perebutan senjata dari tangan tentara Jepang.¹⁸

Badan-badan perjuangan di luar BKR pun juga melakukan hal yang sama. Karena itu sebelum tentara resmi dalam bentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dilahirkan, kedua organisasi tersebut sesungguhnya telah mulai melakukan tugas militer bagi Negara Republik Indonesia dalam rangka usaha menegakkan kedaulatannya.

Keputusan pemimpin nasional untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan bukannya suatu tentara yang sungguh-sungguh dipengaruhi oleh kekhawatiran bahwa Sekutu akan melakukan penghancuran terhadap Republik. Hal ini berdasarkan atas perkiraan bahwa pada saat itu mereka belum mempunyai cukup tenaga yang berketerampilan militer untuk mengadakan perlawanan.

Para pemimpin nasional memutuskan memakai strategi yang didasarkan atas diplomasi dan bukan konfrontasi. Mereka mempertimbangkan dengan mengambil sikap low profile, maka pihak Sekutu tidak akan terprovokasi oleh eksistensi Republik dan tidak akan bertindak represif. Gagasan low profile ini meliputi kebijakan untuk tidak membentuk tentara, melainkan hanya sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Badan Keamanan Rakyat (BKR) dalam tujuan pembentukannya melaksanakan beberapa peran dan tugas yang diamanatkan oleh para pemimpin nasional. Contohnya BKR Malang (Jawa Timur), melakukan upaya menangkap orang-orang utusan Sekutu yang menyamar sebagai anggota Palang Merah Internasional. Hal tersebut berdasarkan kecurigaan mereka terhadap anggota Red Cross tersebut, yang saat ditangkap mereka membawa senjata, pistol dan peralatan sistem komunikasi. BKR melucuti persenjataan tentara Jepang oleh BKR Madiun dan BKR Malang.

¹⁶ T.B. Simatupang, *Pelopor dalam Perang, Pelopor dalam Damai*, (Jajasan Pustaka Militer, 1954), hlm. 55.

¹⁷ Jend. A. H. Nasution. *Tentara Nasional Indonesia Jilid I*, (Djakarta : Ganeco, 1968), hlm. 103

¹⁸ Amrin Imran dkk, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Darat* (Jakarta : Pusat Sejarah ABRI, Departemen Pertahanan Keamanan, 1971), hlm. 3.

2. TKR

Pada tanggal 5 Oktober 1945, B.K.R ini dengan maklumat Pemerintah no.6, telah ditransformasikan menjadi T.K.R (Tentara Keamanan Rakyat). Isi maklumat : “untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat”.

Pada tanggal 6 Oktober 1945 keluar maklumat tambahan yaitu: “sebagai menteri keamanan rakyat diangkat Soeprijadi. Ternyata Soeprijadi sang tokoh pimpinan pemberontakan PETA Blitar ini, tidak pernah muncul. Namun Pemerintah tetap mempertahankan namanya sampai nanti Soedirman diangkat sebagai Panglima T.K.R.¹⁹

Perihal TKR ini dibicarakan untuk pertama kali oleh kabinet R.I pertama (Kabinet Presidentiel dipimpin Presiden Soekarno) pada tanggal 15 Oktober 1945 bertempat di rumah Soekarno jalan Pegangsaan Timur no.56 Jakarta. Semua menteri hadir kecuali Soekarno. Para mantan tentara KNIL (tentara Hindia Belanda) yang hadir adalah Oerip Soemohardjo, Soedibjo, Samidjo dan Didi Kartasasmita. Mantan PETA yang hadir adalah Dr Soetjipto dan Kafrawi. Saat itu berhasil ditetapkan bahwa Oerip Soemohardjo, mantan mayor KNIL yang sudah pensiun, sebagai Kepala Markas Besar Oemoem dan juga sebagai formatir organisasi. Markas besar T.K.R (MBT) segera dibentuk dengan kota Yogya sebagai pusatnya. Untuk pengembangan di Sumatera, pada tanggal 5 November 1945 Dr AK Gani diangkat sebagai organisator dan koordinator T.K.R diseluruh Sumatera.

Tanggal 20 Oktober 1945, Kementerian Keamanan Rakyat mengumumkan secara resmi pengangkatan Soeprijadi selaku Panglima dan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf. Nama lain yang disebut-sebut adalah Moehamad Soeljoadikoesoemo sebagai menteri keamanan ad interim. Tapi karena penolakan dari berbagai pihak dia tidak pernah memangku jabatan tersebut. Menteri Keamanan Rakyat baru diisi oleh Amir Sjariifudin dalam Kabinet Sjahrir pertama (kabinet RI ke II) pada Bulan Oktober 1945.

Pada tanggal 27 Oktober 1945 Pemerintah mengeluarkan maklumat tentang T.K.R. yaitu sebagai bagian dari maklumat pemerintah tentang pemberian perintah dan petunjuk kepada penduduk.

Dikatakan: “Pemerintah R.I lagi berusaha menyusun secepat-cepatnya TENTARA KEAMANAN RAKYAT untuk menanggung kemanan Dalam Negeri, Kemudian agar para pemuda yang berminat berpartisipasi pada lembaga militer ini”.²⁰

Pada tanggal 2 Nopember 1945, pemerintah nasional kota Jakarta misalnya, memang menyerukan agar para bekas PETA, HEIHO, militer Hindia Belanda, Pelopor, Hisbullah, dan para pemuda lainnya yang berumur 18 tahun keatas supaya mendaftarkan namanya bagi tentara keamanan rakyat.

3. TRI

Selama Pemerintahan Sjahrir, tentara berhasil mengkonsolidasikan diri dengan baik dan menuju kesempurnaan organisasi. Pada tanggal 7 Januari 1946 dikeluarkan maklumat no.2 tentang perubahan nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan rakyat (juga disingkat T.K.R). Kementerian

¹⁹ Ruslan Abdulgani, 1987. Indonesia Menatap Masa Depan. Jakarta: Pustaka Merdeka, hal. 359

²⁰ *Ibid*, hlm. 60

keamanan diganti namanya menjadi kementerian pertahanan. Tanggal 25 Januari 1946 T.K.R dirubah lagi menjadi T.R.I (Tentara Republik Indonesia), maksud dari perubahan nama ini adalah untuk memberikan isi pada peleburan unit-unit bersenjata reguler dan iregular yang beroperasi dinegara ini. Tetapi kemudian tindakan ini merupakan kegagalan karena berbagai laskar atau unit-unit paramiliter terus berfiliasi dengan partai-partai politik dan dengan begitu memperumit bahkan menantang otoritas militer TRI.²¹

Laskar-laskar memandang diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan dan unit-unit rakyat yang bersenjata. dan karena itu, mereka menuntut pemerintah mendukung dan mempertahankan mereka. Tetapi laskar-laskar tersebut terus disalahgunakan oleh partai-partai dan para politikus demi tujuan mereka sendiri, karena kontrol pemerintah atas TRI hanya nominal, kenyataan semakin memperburuk masalah dalam tubuh TRI Sementara itu TKR diganti menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia).

Perpecahan di berbagai badan perjuangan di pusat kemudian menyebar ke daerah dan cabang. Persaingan keras muncul antara BPRI dan Pesindo di suatu pihak, dengan Barisan Banteng dan Lasjkar Rakjat di pihak lain.

Peristiwa Cirebon merupakan puncak permusuhan. Antara 8-10 Februari 1946, Mohamad Jusuf menyelenggarakan kongres Front Persatuan di Cirebon tanpa mengundang badan-badan perjuangan dan pemuda yang mendukung pemerintah SoekarnoHatta. Sekitar 200 anggota pasukan Lasjkar Merah hadir. Tatkala Mohamad Jusuf memerintahkan agar bendera nasional diturunkan, TRI bertindak dan pertempuran terjadi. Baru pada 14 Februari, dengan datangnya bala bantuan, TRI berhasil merebut kembali Cirebon.

Pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TRI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soerdiman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Ir. Sakirman, dan Jenderal Mayor Jokusuyono. Dalam ketetapan itu juga menyatakan bahwa semua satuan Angkatan Perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI, diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dari instruksi yang dikeluarkan oleh Pucuk Pimpinan TNI.

Peran Sosiologi Militer dalam Pertahanan dan Kemanan Negara

Mulai dari masa revolusi kemerdekaan sampai sekarang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak pernah absen dari keterlibatan dan peran aktifnya dalam mengembangkan dalam mengembangkan Republik. Dalam perkembangannya terus mengalami metamorphosis seiring dengan perkembangan republik dari mulai berbentuk laskar-laskar perjuangan, Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), tentara rakyat Indonesia (TRI), sampai pada akhirnya menjadi TNI, ABRI dan kembali lagi pada TNI.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa dalam tubuh TNI terjadi dinamika yang menyangkut peran dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan

²¹ G. Moedjanto, 1991. Indonesia Abad ke-20, dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati. Yogyakarta: Kanisius, hal. 119

bangsa Indonesia, ini bagian dari proses pembentukan jati diri TNI. Dinamika TNI tidak lepas dari internal bangsa (nasional) maupun internasional.

Berbagai perubahan yang terjadi baik itu dalam lingkup nasional maupun internasional baik langsung maupun tidak langsung menjadi input bagi penataan dan pengembangan TNI. dalam lingkup nasional yang mempengaruhi TNI adalah perjuangan revolusi, konflik dalam demokrasi liberal, penyimpangan demokrasi terpimpin, sentralisme orde baru, dan gelombang demokratisasi era reformasi.

Sementara secara internasional dinamika TNI dipengaruhi oleh perang dingin (BIPOLAR), dan pasca perang dingin (MULTI POLAR) yang telah melahirkan era internasional baru yaitu perkembangannya demokratisasi dan globalisasi. Oleh karena itu maka TNI melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang terkait dengan peran fungsinya terutama yang menyangkut peran dan fungsi TNI dalam bidang sosial dan politik.

Dimana peran-peran dalam sosial politik yang ketika jaman orde baru “dihalalkan”, maka ketika reformasi berbagai peran itu dipertanyakan dan bahkan dihujat karena dianggap tidak relevan dengan tugas dan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh tentara oleh karena itu tekanan kuat muncul untuk melakukan reposisi peran dan fungsi dan menguranginya, bahkan membersihkan tentara yang aktif baik dalam sosial maupun politik.

Jati diri TNI merupakan pergulatan dan pergesekan antara kutub yang menghendaki agar TNI menjadi tentara profesional dan menjalankan tugas sebijak-bijaknya (mengakui supremasi sipil dan meninggalkan peran di bidang sosial politik). Kebijakan yang dilaksanakan TNI merupakan hasil politik negara, upaya menterjemahkan prinsip-prinsip demokrasi ke dalam kehidupan 49 politik Indonesia selalu harus berhadapan dengan kendala militerisme yang terkait erat dengan otoritarianisme.

Kondisi ini juga sangat kental terasa di negara kita yang telah mengalami reformasi. Tuntutan perubahan selalu terganjal dengan sikap tidak mau mengikuti kalau bukan dikatakan tidak patuh terhadap kemauan masyarakat sipil yang sudah merasa ditekan oleh kepemimpinan yang bercorak militeristik.

Salah satu hal yang dituntut adalah upaya TNI untuk segera meningkatkan profesionalitasnya sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pertahanan dan keamanan negara. Walaupun demikian sebenarnya TNI telah melakukan perubahan, namun profesionalitas yang dikembangkan oleh institusi TNI bukan diarahkan pada profesionalitas yaitu: tingkat keterampilan dan pengetahuan militer yang tinggi, korporasi yang ditandai dengan keterikatan kelompok, solidaritas korop yang kuat, serta tanggungjawab yang mendalam terhadap profesi, (military mind), pada dasarnya TNI telah melakukan perubahan (paradigm shift) dari paradigma lama yang sering berorientasi pada pendekatan keamanan, menuju paradigma baru yang dilandasi cara berpikir analitik dan prospektif berdasarkan pendekatan komprehensif.

Perubahan paradigma yang dilakukan belumlah menyangkut dihilangkannya peran sosial politik yang banyak dianggap sebagai penyebab utama dari distorsi peran TNI atau ABRI, melainkan baru pada tahap menyesuaikan peran sosial politik Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam implemintasinya, yaitu:

1. TNI akan berupaya mengubah posisi tidak selalu di depan;
2. Merubah konsep dari menduduki menjadi mempengaruhi;
3. Mengubah cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung;

4. Kesiapan melakukan kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintah.²²

Peran sosiologi militer dalam pertahanan dan keamanan negara tidak bisa diabaikan dari peran tugas pokok TNI itu sendiri. Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang dilakukan dengan:

1. Operasi militer untuk perang
2. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - a. Mengatasi gerakan separatis bersenjata
 - b. Mengatasi pemberontakan bersenjata
 - c. Mengatasi aksi terorisme
 - d. Mengamankan wilayah perbatasan
 - e. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis
 - f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
 - g. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
 - h. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
 - i. Membantu tugas pemerintahan di daerah
 - j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
 - k. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia
 - l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
 - m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue)
 - n. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan

Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan.

Luasnya wilayah NKRI baik secara geografis maupun demografis merupakan suatu kebanggaan bagi NKRI, namun disisi lain dikhawatirkan timbulnya konflik perpecahan, perselisihan, dan permusuhan antara suku bangsa satu dengan yang lain, antara wilayah satu dengan yang lain.

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sebagaimana termaktub dalam Tap MPR No. VII/2000 tentang Peran TNI dan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan negara dan UU No. 34/2004 tentang TNI. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi

²²Mahadjir Effendi, Profesionalisme Meliter: Profesionalisasi TNI, UMM Pers, h. 224

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Salah satu hal utama yang telah dilakukan TNI dalam menjaga pertahanan dan keamanan adalah melalui Kowil. Keberadaan kowil, merupakan hasil kajian dan menjadi pertimbangan atas pengalaman negara dalam menghadapi bahaya dan ancaman, sehingga Kowil termasuk didalamnya Koramil dan Babinsa, telah diperankan semenjak awal kemerdekaan. Efektifitas Koramil dan Babinsa sudah terbukti, Koramil pada zaman perang kemerdekaan, telah menunjukkan kinerjanya yang secara efektif dapat mengajak masyarakat secara bersama-sama berjuang untuk melawan penjajah, dapat mengajak masyarakat untuk memberikan bantuan kepada para pejuang bangsa yang melakukan perlawanan kepada musuh demi rakyat agar terbebas dari penjajahan. Kowil pada waktu itu bahkan mengendalikan tugas pemerintahan sipil yang tidak operasional, sementara keberadaan pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat.²³

Keberadaan Koramil dan Babinsa di lingkungan masyarakat, dapat menutup dan mencegah adanya peluang berkembangnya organisasi yang menjadi *bahaya laten* bagi negara Indonesia. Pemantauan wilayah yang longgar karena keterbatasan personel Kowil, akan memberi peluang bagi komunis untuk berkembang pesat, karena indikasi kemunculan mereka sudah terlihat, seperti kasus di Jawa Timur, perhimpunan anak - anak keturunan Komunis sudah berani secara terang-terangan melakukan rapat, bahkan mengundang anggota DPR, beruntung ormas pemuda yang menjadi bagian dan binaan komando kewilayahan membubarkan kegiatan tersebut. Dengan keberadaan Koramil dan Babinsa, kerjasama dengan komponen lainnya dalam pemantauan aktifitas masyarakat dapat berlangsung lebih baik dan dapat mencegah, paling tidak dapat menekan berkembangnya organisasi yang menentang kebijakan pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada awal revolusi, Pemerintah Indonesia tidak membentuk tentara resmi. Elemen pembentukan BKR, TKR, TRI hingga TNI dibangun dengan tiga unsur utama yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda yakni mantan anggota KNIL, mantan anggota PETA, dan laskar rakyat. Elemen tersebutlah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya TNI (tentara Nasional Indonesia) yang kemudian berkembang menjadi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan memiliki Kepala Staf Angkatan.
2. Peran sosiologi militer dalam pertahanan dan kewanan negara tidak bisa dijauhkan dari peran tugas pokok TNI itu sendiri. Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara

²³ Lihat Julius Pour, 2009, hlm.225

3. Salah satu bentuk peranan sosiologi militer adalah kowil (Komando Kewilayahan), Keberadaan Koramil dan Babinsa di lingkungan masyarakat, dapat menutup dan mencegah adanya peluang berkembangnya organisasi yang menjadi *bahaya laten* bagi negara Indonesia. Pemantauan wilayah yang longgar karena keterbatasan personel Kowil, akan memberi peluang bagi komunis untuk berkembang pesat, karena indikasi kemunculan bahaya yang mengancam pertahanan dan keamanan negara sudah terlihat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Ruslan. 1987. *Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Merdeka.
- Al Rasyid, Harun. 1968. *Sekitar Proklamasi, Konstitusi, dan Dekrit Presiden*. Djakarta: Pelita Ilmu
- Amrin Imran dkk. 1971. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Darat*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, Departemen Pertahanan Keamanan.
- Bachtiar, Harsja W. 1988. *Siapa Dia? Perwira Tinggi Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI-AD)*. Jakarta: Djambatan.
- Budi Susanto, SJ. *ABRI, Siasat Kebudayaan 1945-1995*. Yogyakarta: Kanisius.
- Effendi, Mahadjir. *Profesionalisme Meliter: Profesionalisasi TNI*, UMM Pers.
- G. Moedjanto. 1991. *Indonesia Abad ke-20, dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati*. Yogyakarta: Kanisius.
- Isnaeni, Hendri F. 2008. *Kontroversi Sang Kolaborator*. Jakarta: Ombak.
- Jend. A. H. Nasution. 1968. *Tentara Nasional Indonesia Jilid I*. Djakarta: Ganeco.
- Kartodirdjo, Suyatno. 1997. *Kepemimpinan ABRI dalam Perspektif sejarah.*” dalam Djoko Subroto, *Visi ABRI Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Matanasi, Petrik. 2007. *KNIL Bom Waktu Tinggalan Belanda*. Yogyakarta: Medpress.
- Muhaimin, Yahya A. 2005. *Perkembangan militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Notosusanto, Nugroho. 1985. *Prajurit dan Pejuang, Persepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Notosusanto, Nugroho. 1985. *Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka*, (Ed Lux). Jakarta: Citra Lamtorogung Persada.
- Permitter, Amos. 1984. *The Military and Politic In Modern times on Profesional, Prerian ang Revolusioner*, (terjrn) Sahat Simamora. Jakarta: Rajawali.
- Supomo, dkk, Atim. 1996. *Brimob Polri Jateng dan DIY dalam Lintasan Sejarah*. Semarang: Brigade Mobile Polri Polda Jateng
- Suryanegara, Ahmad Mansyur. 1996. *PETA; Pemberontakan Di Cileunca Pangalengan Bandung Selatan*. Jakarta, Yayasan Wira Patria Mandiri.
- T.B. Simatupang. 1954. *Pelopor dalam Perang, Pelopor dalam Damai*. Djakarta: Jajasan Pustaka Militer.
- Veer, Paul Van't. 1985. *Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*. Jakarta: Grafiti Pers.